

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah publik yang kompleks, dan bersifat multidimensi. Sebagaimana pendapat Wrihatnolo yang menyatakan bahwa multidimensional sifat kemiskinan tidak hanya disebabkan satu faktor, melainkan berbagai faktor seperti; aspek ekonomi, sosiologis, antropologis, kebijakan, teknologi serta perubahan global. Kemiskinan juga berimplikasi terhadap pendidikan, kesehatan, kemampuan ekonomi, serta partisipasi politik masyarakat dalam sebuah Negara.¹

Kemiskinan telah membuat Jutaan rakyat tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus migrasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya Human Development Index (HDI).²

Setiap Negara pasti Memiliki masalah masing-masing, tidak terkecuali Negara Indonesia. Indonesia memiliki beberapa masalah, salah satu diantaranya adalah bidang sosial ekonomi seperti masalah kemiskinan. Masyarakat miskin tidak cukup mampu dalam menghadapi perkembangan dizaman globalisasi saat ini. Dengan adanya kemiskinan maka akan menghambat tujuan dan

¹ Wrihatnolo, Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2002). 18

² Samodra Wibawa, Evaluasi Kebijakan Publik, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 53.

cita-cita Negara.³ Di Indonesia kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tersurat dalam dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 serta Pasal 34 ayat 2 menjelaskan tentang jaminan sosial kepada masyarakat dan pasal 34 ayat 3 menjelaskan pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum. Pada pasalpasal tersebut diatas menjelaskan akan hak-hak setiap warga negara dan bagaimana kewajiban negara terhadap masyarakatnya.⁴

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemerintah mengklasifikasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dalam tiga kelompok (klaster) kebijakan yaitu sebagai berikut :⁵

1. Pertama, adalah kelompok kebijakan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. kebijakan ini berupa program-program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh Keluarga Sangat Miskin (KSM). Klasifikasi program ini meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Kedua, adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Karakteristik kebijakan ini adalah program dengan pendekatan partisipatif,

³ Dyah Ayu Virgoreta dkk, Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, No 12, 1-6

⁴ UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) Parkir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

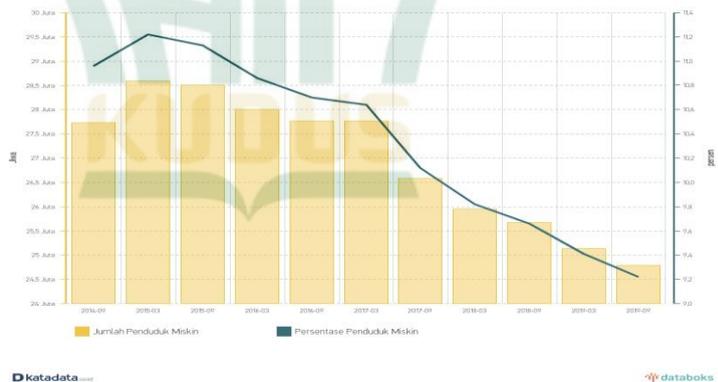
⁵ Erwan Agus Purwanto, Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, (Yogyakarta : Gava Media, 2012), 8.

penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok, serta perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Penerima manfaat program adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Contohnya adalah PNPM Mandiri.

3. Ketiga adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Karakteristik kebijakan ini berupa program yang memberikan bantuan modal skala mikro, memperkuat kemandirian usaha dan meningkatkan manajemen usaha. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Jumlah angka kemiskinan yang ada di Indonesia dalam beberapa tahun ini dinilai masih cukup tinggi jumlah penduduk miskin, berikut ini adalah angka kemiskinan yang ada di Indonesia yaitu :

Gambar 1.1
Jumlah penduduk miskin di Indonesia⁶



Sumber: databoks kata data berdasarkan BPS 2019

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/17/5-angka-kemiskinan-turun-155-bps>

Berdasarkan data pada gambar 1.1 menggambarkan bahwa pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin mencapai 27,73 juta jiwa atau sekitar 10,96% dari total populasi. Pada tahun 2015 tingkat kemiskinan kembali naik saat pemerintah mencabut subsidi BBM, namun secara bertahap kemiskinan di Indonesia terus turun hingga maret 2019 sampai menjadi 9,41% dari data tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan program apakah yang mampu menurunkan angka kemiskinan penduduk Indonesia.

Pemerintah dalam usahanya menurunkan tingginya angka kemiskinan yaitu dengan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, melalui program pengentasan kemiskinan seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS, RASKIN, BSM, PKH), program berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), pemberdayaan usaha mikro (KUR), program-program ini berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa: “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.”⁷

Kemiskinan atau kefakiran adalah suatu fakta, yang dilihat dari kacamata dan sudut mana pun seharusnya mendapat pengertian yang sesuai dengan realitasnya namun gambaran/fakta tentang kemiskinan yang ada berbeda-beda. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atas barang ataupun jasa secara mutlak. Karena kebutuhan berkembang seiring dengan berkembang dan majunya produk-produk barang ataupun jasa, maka –mereka menganggap–usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan atas barang dan jasa itu pun mengalami perkembangan dan perbedaan. Di AS atau di negara-negara Eropa Barat, seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekundernya sudah dianggap miskin. Pada saat yang sama, di Irak, Sudan,

⁷ Kementerian Sosial, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (On-line) [https://www.kemsos.go.id/unduh/UU-kesos No11 2009](https://www.kemsos.go.id/unduh/UU-kesos%20No11%202009)

Bangladesh misalnya, seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, tidak dikelompokkan dalam kategori fakir/miskin. Perbedaan-perbedaan ini—meski fakta tentang kemiskinan itu sama saja di mana pun akan mempengaruhi mekanisme dan cara-cara pemecahan masalah kemiskinan.⁸

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dari masa ke masa, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penanganan dan program yang khusus. Perkembangan kemiskinan di Indonesia jika dilihat dari data BPS cenderung menurun untuk jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin yang diikuti dengan peningkatan garis kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk memberikan peluang kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraannya, seperti jaringan pengaman sosial, Subsidi Langsung Tunai (SLT), Beras Miskin (Raskin), Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Aseskin), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin (PNPM), serta program yang terakhir diluncurkan adalah Program Keluarga Masyarakat (PKH).

Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi hal tersebut. Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dilaksanakan sejak tahun 2007. Di Desa Mlaten sendiri PKH dilaksanakan pada tahun 2013. PKH di Desa Mlaten di damping oleh Mbak Rima Mazrodaton Azizah, dikarenakan tingkat penduduk sejahtera di Desa Mlaten cukup tinggi maka dapat mempengaruhi aspek-aspek lainnya, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Oleh sebab itu untuk menanggulangi keluarga miskin yang maka pemerintah memberikan bantuan tunai melalui program Keluarga Harapan dengan

⁸ Ikhwani Abidin Basri. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 24.

harapan mampu membantu mensejahterakan masyarakat di desa Mlaten.

Table 1.1
Data perkembangan KPM dari 2013-2018

No	Tahun	Jumlah
1.	PKH tahun 2013	23 KPM
2.	PKH tahun 2016	20 KPM
3.	PKH tahun 2018	27 KPM

Sumber: Buku Kerja Pendamping PKH

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah KPM di Desa Mlaten yang mendapat PKH sebanyak 70 KPM. pada tahun pertama penerima PKH sebanyak 23 KPM, pada tahun 2016 terdapat pemanbahan KPM sebanyak 20 KPM. dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan kembali berjumlah 27 KPM.

Table 1.2
Data KPM Keluar PKH dari 2013-2018

No	Tahun	Jumlah
1.	KPM keluar tahun 2014	1
2.	KPM keluar tahun 2016	1
3.	KPM keluar tahun 2018	3

Sumber : Buku Kerja Pendamping PKH

Berdasarkan data diatas penerima KPM di Desa Mlaten dari Tahun 2013 hingga Akhir 2018 mengalami penurunan sebanyak 5 KPM. maka berdasarkan table di atas maka bisa dikatakan bahwa Implementasi PKH di Desa Mlaten sudah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mensejahterakan Masyarakat Miskin ditinjau dari Prespektif Ekonomi Islam di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan masalah dalam suatu penelitian yang akan mengarahkan peneliti pada satu teori atau kajian fakta lapangan yang utuh, mendalam, terstruktur, dan sistematis.

Adapun fokus penelitian yang akan dijadikan batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang “Implementasi Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mlaten”.

C. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?
2. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak?
3. Bagaimana analisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mlaten dalam perspektif Ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. Tujuan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan menjadi akhir jawaban dari sebuah penelitian. Agar memudahkan pelaksanaan penelitian, maka perlu mengetahui capaian tujuannya. Sehingga penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan permasalahan yang direncanakan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

3. Untuk mengetahui bagaimana analisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif Ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif ekonomi islam.
- b. Diharapkan bisa dijadikan sumber informasi dan referensi untuk penelitian dengan topik-topik yang berkaitan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Dinas Sosial sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja Program Keluarga Harapan untuk kedepannya, bagi masyarakat yang mendapat PKH secara umum dan secara khusus untuk masyarakat desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan dan pedoman dalam penggunaan PKH.

F. Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penulisan dalam skripsi ini:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman moto, halaman persembahan, halaman transliterasi arab-latin, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini berisi mengenai kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, pertanyaan penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini dijabarkan tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini dijabarkan tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang simpulan, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.